

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Penulis mengangkat judul “Upaya Rezim Mubarak Dalam Meningkatkan Legitimasi Pemerintahannya Dengan Memanfaatkan Isu Perempuan” sebagai judul skripsi yang akan ditulis. Berawal dari rasa ketertarikan dan rasa keingintahuan penulis yang besar terhadap permasalahan yang dihadapi oleh kaum perempuan di seluruh dunia, dalam konteks ini perjuangan perempuan Mesir dalam memperjuangkan haknya untuk ikut terlibat aktif dalam mengurus urusan publik (politik, ekonomi, dan sosial). Disamping skripsi ini belum pernah ditulis sebelumnya, juga tidak dapat dipungkiri bahwa kajian yang bertemakan perempuan akan selalu menarik untuk dibahas karena bersifat *Ad Infinitum*¹. Hal ini terutama dipengaruhi oleh semakin luasnya masalah yang dihadapi oleh kaum perempuan seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan ide-ide pencerahan (*mainset*) yang datang dari kaum perempuan Mesir itu sendiri. Dan pengaruh yang didapat dari luar negeri seperti kemajuan yang diperoleh oleh perempuan dinegara-negara Eropa dan Amerika yang *notabene* selangkah lebih dahulu menyadari hak-hak mereka sebagai makhluk Tuhan yang sejajar dengan kaum pria. Dan perempuan Mesir menurut hemat penulis sangat representatif diangkat sebagai contoh kasus dalam skripsi ini

¹ B.N Marbu, S.H, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan , Jakarta, 1996
(*Ad infinitum*: sampai tidak berkesudahan (tiada hingganya), tidak terbatas, sesuatu yang berlangsung terus menerus tanpa selesai).

karena apresiasi perempuannya dapat mewakili perjuangan kaum perempuan dunia terutama untuk kawasan Timur Tengah.

Feminisme atau di Mesir lebih dikenal sebagai gerakan pembebasan kaum perempuan, dikalangan kaum perempuan kelahirannya dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan gender (*gender different*) yang kemudian melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Dimana tradisi Patriarkhal yang dianut oleh masyarakat Mesir telah menempatkan perempuan dalam sekedar urusan domestik, label paten bahwa laki-laki adalah superior dan memiliki kedudukan diatas kaum perempuan, sehingga kemudian memunculkan penindasan dan tindak semena-mena terhadap perempuan, pembacaan akan suatu teks agama secara literal dan tekstual, hingga *stereotype* tertentu yang bermuara pada marginalisasi kaum perempuan dalam kurun waktu lama, telah mengkonstruksi sistem tatanan sosial yang *male-dominated*².

Tak bisa dipungkiri bahwa kaum perempuan Mesir dianggap sebagai *pioneer* dari gerakan pembebasan kaum perempuan khususnya untuk kawasan Timur Tengah. Gerakan ini mengusung nilai-nilai kesetaraan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Nilai-nilai tersebut menyangkut hak-hak untuk terlibat aktif dalam ruang publik seperti bekerja dan memiliki kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki, memperoleh pendidikan hingga tingkat setinggi-tingginya, hak untuk berpartisipasi dalam politik, keorganisasian dan pemerintahan.

² Ratih Nugraheni dan Meriyu Arif, Implementasi Gerakan Politik Perempuan Mesir (Kurun Waktu 1957-1985), Makalah Dalam Forum PNMHII, Yogyakarta, 2004, hal 2. (Tidak dipublikasikan)

Sepanjang perjalanan sejarah negara Mesir, dari dekade ke dekade selalu saja ditemukan nama-nama tokoh baik perempuan maupun laki-laki yang berjuang untuk menegakkan kesetaraan gender. Dizaman Pharoh Sebut saja Ratu Hatshepsut yang berkuasa dari 1479 sampai 1457 B.C., Nefertiti, Cleopatra, dan Shajaret ad-Dorr³. Dimasa-masa sebelum kemerdekaan Mesir hadir nama-nama Qasim Amin yang oleh sebahagian tokoh dianggap sebagai Bapak Feminisme Arab dan mengguncang dunia feminisme Arab dengan bukunya yang berjudul *Tahrir al-Mar'ah* (Pembebasan Perempuan) terbit pada tahun 1899 dan *Al-Mar'ah Al-Jadidah* (Perempuan Modern) yang terbit tahun 1900, Nabawiya Musa, Malak Hifni Nasif, May Zayada, dan Labiba Hasyim, Hoda Sya'rawi, Saiza Nabarawi. Pasca kemerdekaan Mesir hadir Fatima Ni'mat Rashid, Duriya Shafiq, dan Inji Aflatun. Dan ditahun 1970-an hingga sekarang hadir sosok Nawal El Saadawi yang paling vokal dalam meneriakan ide kesetaraan gender, dan masih banyak tokoh-tokoh yang lainnya.

Namun dalam prakteknya perempuan di Mesir masih saja mengalami apa yang disebut sebagai tatanan sosial yang *male-dominated* dan bias gender, dimana perempuan tidak terlalu diperhatikan keberadaannya dan dianggap sebagai *second sex*. Perlakuan tidak adil pemerintah ini membuat kaum perempuan berusaha untuk menuntut hak-haknya. Namun dilatarbelakangi oleh keadaan Mesir yang bernama asli *Gomhuriat Masr Al-Arabiah* (Republik Arab Mesir) yang semenjak revolusi tahun 1952 menjadi negara yang berada dibawah kepemimpinan seorang presiden diktator yang berbasis militerisme dan hal ini

³ <http://www.weekly.ahrem.org.eg>. Diakses tanggal 13 Desember 2006

berlangsung hingga saat Presiden Anwar Sadat ditembak mati hingga digantikan oleh Hosni Mubarak. Sehingga Dengan logika politik dapat dipahami bahwa sistem diktatorisme yang ada akan berusaha menekan seminimal mungkin partisipasi politik perempuan Mesir untuk ikut campur dalam pemerintahan, bahkan sistem yang ada cenderung berusaha untuk mengembalikan perempuan ke dalam urusan domestik (rumah). Dengan kondisi yang demikian dapat dikatakan bahwa sebuah keniscayaan bagi perempuan untuk memperoleh haknya untuk ikut aktif berpartisipasi dalam lingkup politik.

Merujuk pada penjelasan diatas, penulis mencoba mencari alibi dari keterlibatan perempuan dalam urusan-urusan dan ruang publik di negara Mesir, bahwa mereka para perempuan dijadikan sebagai alat dari penguasa untuk membentuk opini publik yang positif dalam meningkatkan legitimasi politik rezim yang berkuasa terutama ketika Mesir dipimpin oleh presiden Hosni Mubarak. Dalam arti kehadiran perempuan sengaja dimanfaatkan untuk menarik simpati dari kalangan-kalangan elit politik dalam negeri, kalangan elit politik Dunia Arab, bahkan dunia politik internasional. Sehingga Mubarak mendapat tempat dihati penduduknya yang *notabene* mengalami krisis kepercayaan yang tinggi, dan tidak dipandang oleh rezim negara-negara di kawasan Timur Tengah lainnya serta diacuhkan dalam percaturan politik Internasional

B. Tujuan Penelitian

Karya tulis ini dibuat merupakan bentuk kritisi penulis terhadap fenomena persoalan yang dihadapi perempuan pada umumnya dan perempuan

Mesir khususnya, serta usaha-usaha yang ditempuh oleh kaum perempuan Mesir dalam rangka memperoleh hak mereka untuk terlibat aktif dalam urusan publik. Disamping itu penulis ingin mengetahui bagaimana Hosni Mubarak memanfaatkan isu dan peran perempuan sebagai alat untuk meningkatkan legitimasi pemerintahannya.

Selain itu karya ini dibuat sebagai sarana untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu-ilmu yang telah didapat selama duduk di perguruan tinggi dan juga sebagai prasyarat untuk menempuh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Mesir mengalami situasi politik yang sangat sensitif periode 1979 hingga 1981 ditandai dengan adanya percobaan pembunuhan terhadap Presiden Mohammed Anwar el-Sadat (Anwar Sadat) dan unjuk rasa massal di kota-kota besar dan luar negeri. Situasi ini timbul sebagai akibat adanya penentangan masyarakat terhadap Presiden Anwar Sadat yang telah melakukan terobosan politik yang sangat tidak populer bagi kalangan penduduk Mesir dan Dunia Arab, yaitu dengan mengadakan kunjungan ke Jarussalem atas undangan Perdana Menteri Israel Menachem Begin di tahun 1977⁴ dan menandatangani perjanjian damai antara Mesir dan Israel yang dikenal dengan perjanjian Camp David atas

⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Anwar_Sadat. Diakses tanggal 25 Agustus 2006

prakarsa Jimmy Carter dan Henry Kissinger di Camp David Amerika Serikat pada tanggal 17 September 1979.

Secara pribadi tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya legitimasi Sadat agar diterima untuk masuk kedalam pergaulan politik internasional tentu saja kaitannya disini Amerika Serikat. Hal ini terutama dilakukan setelah Mesir tidak lagi dekat dengan Uni Soviet. Dilihat dari kepentingan negara Mesir upaya ini dilakukan Sadat untuk mencari solusi terhadap keadaan Mesir yang mengalami kerugian besar pasca perang ditahun 1973 yang tidak berhasil membawa Sinai dan West Bank kembali dalam wilayah kekuasaan Mesir, Sadat memutuskan untuk mendapatkan wilayah itu kembali melalui jalan perdamaian. Ternyata berlarut-larutnya permusuhan dengan Israel telah menuntun Mesir pada kelelahan karena bukan saja menguras tenaga dan dana, tapi juga tidak berhasilnya menyelesaikan sengketa antara Arab dan Israel. Oleh sebab itu Sadat mulai berorientasi kepada negara-negara Barat untuk mendapatkan momentum politik dan ekonomi yang lebih besar. Apapun alasan yang ada dibalik tindakan Sadat tersebut, pada akhirnya telah menyeret Sadat pada kemarahan rakyat Mesir dan bangsa Arab yang besar terhadap dirinya.

Penentangan terhadap Anwar Sadat yang berdatangan dari dalam negeri dan kalangan sahabat-sahabat politiknya di Dunia Arab ini, berpengaruh besar pada menurunnya legitimasi Sadat sehingga dia diasingkan oleh penduduk Mesir dan bangsa Arab serta dianggap sebagai pengkhianat. Hal ini bisa dilihat dari kekacauan yang terjadi di Mesir pada periode 1979-1981. Sering terjadi huru-hura

sebagai penentangan terhadap Sadat, tindakan ini banyak dimotori oleh kelompok fundamentalisme Islam di Mesir.

Kekecewaan terhadap perlakuan yang diterima telah membawa Sadat melakukan tindakan-tindakan represif. Diantaranya terhadap pergerakan Islam yang dianggap fundamentalis, menangkap sekumpulan pelajar dan organisasi koptik yang dianggap mengganggu stabilitas nasional Mesir⁵. Serta menekan keberadaan perempuan, memberengus pemikiran dan hak-hak perempuan terutama tokoh-tokoh perempuan seperti Nawal El Saadawi. Hal ini dilakukan merupakan luapan dari rasa ketakutan dan kewaspadaan rezim Sadat terhadap kekuatan perempuan yang dikuatirkan akan mampu melahirkan kekuatan politis baru. Tidak kurang dari 1500 orang pada saat itu ditangkap dan dipenjarakan.

Kebijakan yang diambil Sadat bukannya membuat keadaan menjadi lebih baik sebaliknya keadaan semakin memburuk. Selain didalam negeri dimusuhi diluar negeripun Anwar Sadat dianggap sebagai penjahat HAM. Puncak kekecewaan penduduk Mesir terjadi pada tanggal Pada tanggal 6 Oktober 1981, Presiden Anwar Sadat ditembak dalam sebuah parade militer oleh anggota tentara Jihad Islam yang dipimpin oleh Letnan Khaled Islambouli. Ini merupakan Organisasi muslim Mesir yang berhaluan keras yang menentang perjanjian damai Mesir dengan Israel⁶.

Setelah Sadat mangkat untuk sementara waktu Sufi Abu Taleb diangkat sebagai Pemangku Jabatan Presiden yang menjabat dari tanggal 6 Oktober 1981-

⁵ *Ibid*

⁶ *ibid*

14 Oktober 1981⁷. Barulah pada tanggal 14 Oktober 1981 melalui referendum Hosni Mubarak yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden semasa Sadat diangkat menjadi Presiden Mesir.

Muhammad Hosni Said Mubarak yang lebih dikenal umum sebagai Hosni Mubarak lahir pada tanggal 4 Mei 1928. Awal karir Mubarak dimulai di Akademi Angkatan Udara sebagai salah satu tim pengajar untuk periode 1952-1959. Setelah bergabung di Akademi Militer FROUNZ (Uni Soviet), menjadi Komandan Pangkalan Udara Barat Kairo (1964) dan menjabat Direktur Akademi Angkatan Udara pada tahun 1968. Pada tahun 1969, menjabat Kepala Staf Angkatan Udara dan Komandan Angkatan Udara serta Wakil Menteri Peperangan (1972). Pada 1974, dipromosikan ke peringkat Letnan Jendral dan Wakil-Presiden Republik Arab Mesir (1975). Pada 1979, Mubarak menjabat Wakil-Presiden Partai Demokratik Nasional (NDP) dan langsung menjabat Presiden Republik Arab Mesir pada 1981⁸.

Pemerintahan baru Mubarak ternyata mengalami nasib yang tidak jauh berbeda dengan pemerintahan Sadat, ditandai dengan keadaan Mesir yang mengalami berbagai krisis dan legitimasi pemerintahan Mubarak yang mengalami kemerosotan. Keadaan yang ada pada akhirnya bermuara pada berkembangnya aksioma-aksioma berupa sikap anti terhadap pemerintah yang menjabat. Hal ini dapat dimaklumi dengan pengalaman Mubarak yang masih sedikit dalam dunia politik Mesir, menimbulkan rasa ketidakpercayaan akan kemampuan Mubarak

⁷ *Ibid*

⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/Presiden-Mesir/Hosni_Mubarak. Diakses tanggal 25 Agustus 2006

dalam menanggulangi dan mengelola situasi negara. Selain itu sikap Mubarak yang tetap mempertahankan ide reformis Sadat untuk berdamai dengan Israel telah mengundang kemarahan rakyat. Keadaan ini mendorong semakin merosotnya legitimasi Mubarak. Dan semakin sulit sebagai akibat dari kebijaksanaan Anwar Sadat yang telah menjadi musuh dengan mengeluarkan dan mengasingkan dirinya dari rakyat Mesir, mengeluarkan dan mengasingkan Mesir dari dunia Arab yang kemudian menyatukan diri dengan Barat.

Defisit legitimasi yang dialami oleh pemerintahan baru Mubarak mengakibatkan terjadinya berbagai krisis di dalam dan luar negeri Mesir. Di dalam negeri terjadi krisis Krisis Ekonomi sebagai akibat dari kebijakan *iftihah* Presiden Anwar Sadat. Krisis sosial, di Mesir ditandai dengan terjadinya inflasi keuangan negara dan kesenjangan sosial. Krisis politik yang diakibatkan oleh krisis legitimasi memicu terjadinya penindasan politik dan perlawanan terhadap rezim Mubarak yang berkuasa, munculnya oposisi sekuler dan militansi Islam yang mungkin bisa bersifat lebih keras, dan keluarnya tuntutan dari kaum perempuan Mesir terhadap apresiasi dari hak-hak mereka yang direnggut paksa oleh rezim Sadat. Serta krisis sosio-kultural, hal ini dapat dilihat dari tingkat *satisfaction* yang sangat rendah terhadap pemerintahan yang berkuasa. Sehingga mendorong rakyat untuk melakukan tindakan yang anarkhis seperti demonstrasi dan pengrusakan fasilitas umum, beberap kali juga terjadi percobaan pembunuhan terhadap Hosni Mubarak.

Hal serupa juga terjadi di luar negeri terutama untuk kawasan Dunia Arab, para pembesar Arab membuat kebijakan untuk mengucilkan Mesir dan melakukan pemboikotan-pemboikotan terhadap arus ekonomi dan politik yang keluar masuk Mesir. Bahkan Mesir yang semula dianggap sebagai salah satu negara dalam jajaran terdepan pemimpin Arab dalam mengurus politik kawasan Arab yang memang rentan terhadap konflik, pada akhirnya diputuskan untuk dikeluarkan dari perkumpulan negara-negara Arab. Puncaknya Mesir dikeluarkan dari Organisasi Liga Arab.

Dengan posisinya yang sulit dapat dipahami bahwa Mubarak tidak boleh gegabah dalam mengambil kebijakan. Karena dia tidak saja harus bisa bersikap bijak terhadap masyarakat Mesir tetapi juga terhadap masyarakat komunitas negara-negara Arab. Seperti diketahui bahwa sosok Hosni Mubarak bukanlah pribadi yang memiliki kharisma besar seperti pendahulunya Gamal Abdul Nasser dan Anwar Sadat. Hal tersebut sangat mempengaruhi gaya Mubarak dalam membangun legitimasi dengan melakukan tindakan-tindakan positif dan rasional melalui struktur pemerintahan otoritatif serta cenderung menghindari konflik. Salah satunya adalah kebijakannya terhadap perempuan Mesir.

Perempuan Mesir merupakan gambaran perjuangan perempuan dunia dalam memerangi ketidakadilan gender sebagai akibat *stereotype* yang melekat pada diri mereka. Upaya tersebut dilakukan dengan mencoba membuka diri terhadap perubahan dan mulai melakukan kegiatan-kegiatan yang mengurus urusan publik. Tahun 1909 dianggap sebagai *moment* keterlibatan perempuan Mesir secara terang-terangan dalam kancah urusan publik. Ditandai dengan

keterlibatan aktif para perempuan dalam memperjuangkan kemerdekaan Mesir dari tangan Inggris dengan melakukan demonstrasi turun ke jalan. Demonstrasi ini salah satunya dipelopori oleh Huda Sharawi (1882-1947) yang juga mengadakan aksi penggalangan tanda tangan untuk sebuah petisi yang disampaikan kepada Komisi Tinggi Inggris dan para pemimpin Mesir. Petisi tersebut menyatakan:

“Kami perempuan Mesir, para ibu, saudara perempuan, dan istri yang menjadi korban ketamakan dan eksploitasi Inggris...menyesalkan kebrutalan dan aksi barbarisme yang telah terjadi...Masyarakat Mesir berkomitmen bahwa tidak ada lagi kekerasan selain mengekspresikan keinginan untuk bebas dan merdeka”⁹.

Melalui perjuangan panjang perempuan Mesir mulai mencari bentuk ideal dari perjuangan mereka sehingga dapat diterima oleh seluruh kalangan masyarakat Mesir dan mendapat dukungan dari luar negeri. Tak semudah yang bisa kita gambarkan sekarang, perempuan Mesir dalam memperjuangkan hak-hak mereka juga mendapat penentangan dari pemerintahan setempat bahkan dari golongan kaum agamis yang melakukan pemahaman tekstual terhadap ajaran agama. Mereka telah memaksa kaum perempuan untuk kembali ke lingkungan domestik dan beranggapan bahwa urusan publik merupakan dunia laki-laki bukan perempuan, hal ini terutama dirasakan ketika Mesir berada dibawah pemerintahan Presiden Anwar Sadat.

Women issue di Mesir pada masa pemerintahan Sadat dianggap sebagai isu yang *non-central*. Sebagai akibat dari konsentrasi Sadat yang diberikan sepenuhnya kepada liberalisasi Mesir. Pada masa itu kebijakan-kebijakan politis Sadat yang oleh Saadawi dianggap sebagai produk dari sebuah sistem demokrasi Barat yang salah, kekuasaan kepemimpinannya diterjemahkan tidak lebih dari

⁹ <http://www.kalyanamitra.or.id/>. Diakses tanggal 25 Agustus 2006

pusaran kekuatan militer, kekuasaan uang, kepentingan multinasional dan lain-lain¹⁰.

Sadat cenderung untuk mendahulukan hal-hal yang menjadi agenda politiknya, tanpa melakukan koreksi terhadap kesiapan sumber daya manusia Mesir, tentu saja yang penulis maksud di sini adalah kesiapan kaum perempuan Mesir terhadap perubahan-perubahan tersebut. Sehingga yang terjadi kemudian adalah suatu ketimpangan peran perempuan dimana perempuan tidak mampu untuk ikut bersaing dalam kehidupan publik, sementara mereka juga tidak memiliki bekal yang memadai dalam hal ini pendidikan yang kurang untuk mendidik anak-anak mereka yang hidup pada saat Mesir mengalami liberalisasi.

Sadat yang melakukan kebijakan liberalisasi terhadap sebahagian besar sektor-sektor publik dirasa terlalu tidak adil terhadap nasib kaum perempuan Mesir. karena pada saat yang sama Sadat juga berusaha untuk meredam pergerakan perempuan Mesir, Sadat bersama-sama dengan kawan-kawan politiknya beranggapan bahwa isu-isu perempuan yang berkembang di Mesir merupakan suatu gerakan yang menyalahi kodrat perempuan yang seharusnya mengurus urusan domestik. Hal ini diperkuat dengan *statement* yang dikeluarkan oleh gerakan fundamentalisme Islam *Ikhwanul Al-Muslimin* yang notabene pada masa itu merupakan salah satu pergerakan Islam yang digandeng Sadat dalam pemerintahannya, yang sangat menentang keberadaan perempuan untuk tampil dalam urusan publik negara Mesir.

¹⁰ <http://www.lipi.go.id/www.cgi?.cetakberita&116497398&2006&>. Diakses tanggal 11 Februari 2007.

Indikator-indikator diatas telah menghantarkan perempuan Mesir pada suatu keadaan yang menekan keberadaan mereka dalam menjalankan fungsi publik. Salah satunya adalah hal yang dialami oleh Nawal El Sadaawi, tokoh perempuan ini karya-karyanya banyak menohok kalangan muslim dan penguasa di negaranya. *The Fall of the Imam* (Jatuhnya Sang Imam) misalnya. Yang menarik dalam novel ini adalah keberanian pengarangnya dalam mendobrak sistem dan (manipulasi) ajaran agama yang selama ini sering terjadi. Selain itu, karismanya di bidang kesehatan umum sangat mencolok, baik di Mesir maupun di luar negeri, sampai ia mengakhiri jabatan sebagai Dirjen Pendidikan Kedokteran, Kementerian Kesehatan di Kairo tahun 1972. Ia diberhentikan oleh instansi tersebut termasuk pencopotannya sebagai direktur kesehatan masyarakat akibat tulisannya yang blak-blakan tentang seksualitas, terutama dalam karyanya *Woman and Sex*. Sembilan tahun kemudian, pada 1981, ia dipenjarakan atas tuduhan 'perbuatan kriminal terhadap negara oleh Presiden Anwar Sadat sebagai bagian dari penangkapan dan penahanan besar-besaran tokoh-tokoh intelektual Mesir.

Namun walaupun demikian berkat perjuangan gigih, gerakan yang semula berbentuk *public independent*, di tahun 1980-an menjadi kekuatan besar sebagai pengamalan makna kebersamaan dan pluralistik. Bahwa perempuan Mesir tidak berasal dari satu kalangan saja, mereka merupakan perempuan yang tersebar disepanjang sungai Nil dan memiliki kepentingan berbeda walaupun pada hakekatnya sama yaitu ingin mewujudkan kehidupan perempuan yang sehat dan dekat dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta setara dengan kaum laki-laki dalam urusan publik maupun dalam perundang-undangan.

Dalam beberapa dekade hingga kepemimpinan Mesir dipegang oleh Hosni Mubarak, perempuan Mesir menunjukkan peran yang signifikan. Hal ini terlihat dari keterlibatan aktif perempuan dalam mengurus urusan ekonomi, sosial, bahkan urusan politik. Dengan identitas Gerakan Pembebasan Kaum Perempuan Mesir dan dikomandoi oleh Nawal El-Saadawi, kaum perempuan Mesir mulai menyusun agenda politik gerakan mereka. Perjuangan ini ternyata mendapat perhatian yang besar dari kalangan politik dan gerakan feminisme yang berasal dari luar negeri salah satunya datang dari United Nation (UN). Selain mendapat dukungan, gerakan perempuan di Mesir juga menjadi acuan bagi kaum perempuan dari negara-negara lain dalam menyelesaikan persoalan gender, baik dikawasan Timur Tengah, Eropa, Amerika, dan juga Asia termasuk Indonesia.

Mubarak dengan kecakapan politik dimilikinya membaca peluang ini, selanjutnya melalui kebijakan-kebijakan pemerintahannya mencoba untuk memanfaatkan kekuatan perempuan sebagai salah satu sumber penting dalam meningkatkan legitimasinya. Upaya ini dilakukan untuk menarik perhatian elit politik dan masyarakat Mesir serta Dunia Arab melirikinya sebagai pemimpin yang peduli terhadap nasib perempuan di negaranya. Dengan demikian stigma negatif yang semula melekat pada kepemimpinan Mubarak dapat sedikit demi sedikit berubah menjadi dukungan yang positif. Sehingga kepemimpinan Mubarak dapat diterima oleh masyarakat Mesir, kawasan Dunia Arab, dan politik internasional.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka dapat diangkat pokok permasalahan sebagai berikut “Bagaimana Hosni Mubarak memanfaatkan isu-isu perempuan Mesir, dalam meningkatkan legitimasi pemerintahannya?”.

E. Kerangka Dasar Pemikiran

Dalam melihat permasalahan di atas, setidaknya ada beberapa pemikiran, baik teori maupun konsep yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pokok permasalahan yang muncul dan juga akan membantu dalam memilih konsep-konsep yang tepat bagi pembentukan hipotesa.

Kata “teori” berasal dari bahasa Yunani memiliki pengertian melihat atau memperhatikan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa teori adalah pandangan atau persepsi tentang apa saja yang terjadi, menjelaskan mengapa itu terjadi, dan mungkin juga meramalkan kemungkinan berulangnya kejadian itu di masa depan¹¹.

Untuk menjelaskan dan menganalisa fenomena diatas, penulis menggunakan:

1. Teori Legitimasi

Dalam Ilmu Politik, legitimasi diartikan seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan atau kebijakan yang diambil

¹¹ Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal. 185.

oleh seorang pemimpin¹². Atau dapat juga dikatakan bahwa legitimasi merupakan: Hak untuk berkuasa bagi penguasa sehingga ditaati oleh rakyat, Pengakuan kekuasaan penguasa oleh rakyat (yang dikuasi) yang ditunjukkan dengan ketaatan, dan Keabsahan kekuasaan penguasa dengan memimpin dan mengatur atau mengontrol rakyat dan rakyat mengakui keabsahan tersebut.

Ada banyak ilmuwan politik yang memberikan sumbangsih keilmuan mereka dalam merumuskan pengertian legitimasi. Diantaranya pendapat yang dikemukakan oleh : Lucian W. Pye dia mendefinisikan legitimasi sebagai “sesuatu yang melibatkan kemampuan suatu sistem dan sentimen masyarakat terhadap otoritas pemerintah” (*Legitimacy involves both the performance capacity of the system and the sentiments of population toward governmental authority*)¹³. Jurgen Habermas mendefinisikan legitimasi sebagai : “*a political order's worthiness to be recognized*”¹⁴. Pemahaman lain dikemukakan oleh Micheal G. Roskin bahwa legitimasi dapat juga dikatakan sebagai sebuah perilaku dalam pikiran rakyat (*an attitude in people's mind*), bahwa otoritas suatu pemerintahan adalah sah (*rightful*)¹⁵. Dan ilmuwan lainnya Max Weber berpendapat bahwa yang dimaksud dengan legitimasi adalah merupakan hubungan yang harmonis antara penguasa dan yang dikuasai dimana yang dikuasai menerima keabsahan dari kekuasaan superior sang penguasa. Sehingga dalam konteks legitimasi, maka hubungan antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpin lebih ditentukan adalah

¹² <http://id.wikipedia.org/wiki/Legitimasi>. Diakses tanggal 1 September 2006

¹³ Lucian Pye, “Legitimacy Crisis”, dalam Leonard Binder, et. Al., *Crises and Sequences In Political Development*, Princenton, Princenton Univercity Press, 1971, h 154.

¹⁴ Jurgen Habermas, *Legitimation Crisis*, Terjemahan T. Mc Carthy, Beacon Press, Boston, 1975, h. 8

¹⁵ Micheal G. Roskin, et. Al., *Political Science: An Introduction*, 1986, h. 3.

keputusan masyarakat untuk menerima atau menolak kebijakan yang diambil oleh sang pemimpin¹⁶. *'Without legimacy, a ruler, regime or governmental system is hard-pressed to attain the conflict – management capability essential for long-run stability and good governmen'*¹⁷.

Selanjutnya, Weber mengatakan bahwa pengakuan rakyat terhadap pemimpinnya didasarkan pada motivasi rakyat yang sangat bervariasi dari hanya kebiasaan-kebiasaaan sampai pada alasan-alasan yang lebih rasional seperti atas dasar kepentingan-kepentingannya.

Dengan demikian, konsep legitimasi tidak hanya merupakan *an attitude in peple's mind*, tetapi juga mencakup *expressive feelings*, pendapat mengenai otoritas suatu pemerintahan, dan kemampuan suatu sistem politik untuk melaksanakan fungsinya (*the performance capacity of system*).

Berdasarkan beberapa pengertian legitimasi yang telah dikemukakan diatas, terdapat satu unsur atau esensi pokok legitimasi yaitu : **otoritas**. Para ilmuwan politik berbeda pendapat dalam mendefinisikan esensi otoritas dan menggunakan konsep kekuasaan sebagai alat untuk melakukan analisa. Dalam penelitian penulis ini akan digunakan pendekatan kekuasaan yang dikemukakan oleh Max Weber.

Berdasarkan motif kesetiaan dari rakyat, weber mengatakan bahwa legitimasi dapat diperoleh melalui *tiga* cara, yaitu: *pertama*, dengan alasan-alasan yang rasional seperti pengakuan yang didasarkan pada hukum atau disebut "**Legal Authority**" yaitu bahwa pengakuan yang diberikan bukan atas dasar

¹⁶ <http://id.wikipedia.org/wiki/Legitimasi>. Diakses tanggal 1 September 2006

¹⁷ Micheal C. Hudson, *Arab Politic: The Search For Legitimacy*, (New Heaven and London: Yale Univercity Press, 1997), P.1.

pertimbangan-pertimbangan personal, dengan demikian kekuasaan seorang penguasa dibatasi oleh hukum.

Model pelaksanaan "*Legal Authority*" yang paling dasar ialah adanya staf administrasi dalam sistem birokrasi. Dalam sistem birokrasi yang ideal, dapat ditemukan prinsip-prinsip "*legal rational authority*", yaitu aturan-aturan yang impersonal dalam pelaksanaan kekuasaan, seperti atas dasar suatu hirarki yang didefinisikan secara jelas, tanggung jawab hukum yang lugas, hubungan kontraktual yang bebas, pengangkatan staf-staf atas dasar kualifikasi teknis, pemisahan lembaga dari pemiliknya, karir, adanya disiplin dan kontrol yang tegas dalam pelaksanaan tugas. Tidak boleh ada orang lain kecuali pimpinan puncak organisasi yang boleh mempunyai dominasi kepada pemilihan, atau sengaja dipersiapkan untuk mengambil alih kepemimpinan. Dengan demikian menurut prinsip *legal authority*, suatu otoritas hanya dapat diberikan atas dasar senioritas, kualifikasi teknis atau atas dasar keduanya dengan pengecualian pada pimpinan puncak organisasi.

Tipe kedua *legal authority* adalah tipe "**tradisional**". Didasarkan pada kepercayaan-kepercayaan tradisional yang telah lama berakar atau dengan kata lain pengakuan rakyat didasarkan pada alasan-alasan tradisional bahwa secara tradisi memang sudah sepantasnya pemimpin tersebut berkuasa. Namun pengakuan ini hanya terbatas pada sekelompok orang yang diikat oleh tradisi sama.

Ada tipe yang lebih khusus dari tipe "**tradisional**" ialah "**patriomonalisme**" dan yang lebih ekstrim adalah "**sultanisme**" bahwa

kekuasaan dibangun atas dasar hubungan tradisional antara “patron” (yang berkuasa) dengan “clients” (yang dikuasai). Hubungan kekuasaan seperti ini dapat ditemukan pada hubungan antara tuan tanah dengan para pekerja (petani). Para tuan tanah menyediakan tanah dan ladang serta hewan ternak untuk para petani, dan sebagai imbalan para petani menjaga keselamatan para tuan tanah dan mengakui kekuasaannya. Dalam zaman modern ini penerapan kekuasaan yang tradisional dapat dijumpai apabila para penguasa menggunakan birokrasi dan tentara sebagai sumber kekuasaan yang personal, sehingga seolah-olah birokrasi dan tentara tersebut adalah milik penguasa.

Tipe kekuasaan *ketiga* menurut Weber adalah “kharismatik”, yaitu pengakuan yang diberikan oleh rakyat terhadap penguasa berdasarkan atas kelebihan-kelebihan personal yang dimiliki penguasa atau pemimpinnya, dan kelebihan-kelebihan tersebut tidak dimiliki oleh orang lain.

Dari *tiga* tipe kekuasaan yang dikemukakan oleh Max Weber diatas, melahirkan beberapa tipe dari legitimasi yaitu :

- 1) Legitimasi Tradisional

Penguasa memperoleh Legitimasi dengan memerintah berdasarkan keyakinan-keyakinan lama yang dianut serta menghimbau masyarakatnya pada ikatan-ikatan primordial.

2) Legitimasi Ideologi

Penguasa memperoleh Legitimasi dengan memakai prinsip-prinsip ideologis dengan mengaku menjadi wakil-wakil mistik ideologis, yaitu seperangkat prinsip yang lebih tinggi dari pada manusia.

3) Legitimasi Personal

Penguasa memperoleh legitimasi dengan memfokuskan perhatiannya pada daya tarik personalnya, kepribadian magnetis dan kualitas personal yang luar biasa.

4) Legitimasi Prosedural

Penguasa memperoleh legitimasi dengan mengklaim memerintah berdasarkan satu sistem hukum formal, membuat keputusan-keputusan berdasarkan prosedur hukum dan memperoleh jabatan setelah ditunjuk atau dipilih berdasarkan prosedur-prosedur yang ditetapkan secara hukum.

5) Legitimasi Instrumental

Penguasa memperoleh legitimasi dengan menjustifikasi kekuasaan mereka Dengan memenuhi atau berjanji akan memberikan manfaat-manfaat konkrit bagi warga negara.

Legitimasi dalam sebuah pemerintahan menurut Max Weber dapat dibangun melalui:

- 1) Tindakan positif melalui pembangunan ekonomi dan sosial guna mengatasi masalah equalitas.
- 2) Tindakan rasional melalui penciptaan hukum yang mendukung dan mengesahkan wewenang penguasa¹⁸.

Ada beberapa fungsi pokok dari legitimasi diantaranya sebagai pengendali konflik, menciptakan stabilitas dan menjalankan kekuasaan. Jika legitimasi seorang pemimpin rendah maka dinegara yang bersangkutan akan sering terjadi tindakan politik yang irrasional, kudeta, dan percobaan pembunuhan, keadaan serupa ini disebut keadaan krisis legitimasi. Ada beberapa indikator penting yang mendorong terjadinya krisis legitimasi. Diantaranya:

1) Krisis Ekonomi

Sistem ekonomi memerlukan masukan (input) dalam bentuk kerja dan modal, keluaran (output)-nya adalah **nilai-nilai yang bisa dikonsumsi serta didistribusikan di antara lapisan-lapisan sosial**. Kecenderungan krisis ekonomi ini juga merupakan krisis sosial, sebab menyingkap antagonisme kelas antara para pemilik modal dan massa yang hidup dari upah. Krisis ini dapat tampil dalam bentuk krisis keuangan negara, inflansi tetap, kesenjangan sosial, dan sebagainya.

2) Krisis Politik

Sistem politik memerlukan loyalitas massa, keluarannya adalah **keputusan-keputusan administratif yang dilaksanakan secara berdaulat**. Krisis masukannya dalam bentuk krisis legitimasi, dimana sistem legitimasi tidak berhasil dalam mempertahankan loyalitas massa. Karenanya, tatanan politik

¹⁸ *ibid*, P. 17.

dibeberapa negara rata-rata menyebut identitas diri mereka sebagai bangsa yang demokratis, walaupun dalam kenyataannya jauh dari kehidupan yang demokratis. Negara-negara tersebut seringkali melanggar kebebasan-kebebasan sipil, menunjukkan ikatan-ikatan sipil yang lemah, menunjukkan monopoli kekuasaan, serta kesenjangan yang ekstrim antara golongan kaya dan miskin. Disamping itu, terjadinya krisis politik disuatu negara juga ditandai dengan adanya penindasan politik dan perlawanan terhadap rezim yang berkuasa.

3) Krisis sosio-kultural

Sistem sosio-kultural ini menerima masukannya dari sistem ekonomi dan sistem politik dalam bentuk barang-barang dan jasa-jasa yang dapat dibeli dan diminta secara kolektif, keamanan politik dan sosial, dan seterusnya. Keluarannya adalah **makna yang memotivasi tindakan**. Dalam suatu negara yang memiliki lembaga-lembaga politik lemah dan kesenjangan-kesenjangan ekonomi, akan melahirkan ketidakseimbangan antara aspirasi dan kepuasan. Frustrasi, kekerasan dan instabilitas sering terjadi. Karena itu pemimpin-pemimpin politik mengalami kesulitan untuk melakukan pembangunan politik dan ekonomi secara bersamaan. Hal-hal itulah yang menyebabkan perubahan sosio-kultural masyarakat.

Pada kasus Mesir dengan mengaplikasikan teori legitimasi dengan keadaan pemerintahan Mubarak, maka dapat diketahui bahwa Mubarak dalam mencari pengakuan terhadap kekuasaannya menggunakan

2. Teori Gender

Gender sering kali disamaartikan dengan sex, yaitu jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Bahkan apabila dilihat dalam kamus, kedua kata tersebut juga memiliki kesamaan arti yaitu jenis kelamin¹⁹. Sehingga peran dan tanggung jawab masing-masingnya juga dibedakan sesuai jenis kelaminnya²⁰. Pada kenyataannya anggapan diatas salah, Karena ketika kita berbicara gender yang kita bicarakan bukanlah masalah sex dan sebaliknya.

Ada perbedaan mendasar antara sex dan gender, **sex** menyangkut perbedaan jenis kelamin anak manusia yang terdiri dari laki-laki atau perempuan terutama pada bagian-bagian reproduksi. Jenis kelamin yang telah melekat pada diri mereka tersebut tidak dapat diubah, tidak dapat dipertukarkan, berlaku sepanjang zaman, berlaku dimana saja, merupakan kodrat Tuhan, dan ciptaan Tuhan. **Gender** merupakan pandangan masyarakat terhadap perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang lahir dari hasil konstruksi sosial (yaitu kebiasaan yang tumbuh dan disepakati oleh masyarakat) dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman.

Ada hal dasar yang harus kita cermati secara saksama bahwa manusia pada hakekatnya diciptakan oleh Tuhan berpasang-pasangan. Mereka kaum laki-laki dan perempuan diharapkan mampu bekerja sama dan membentuk kemitraan yang harmonis. Namun sebagai akibat dari pembenaran tidak rasional terhadap nilai-nilai yang dianut oleh sistem sosial budaya, pada akhirnya melahirkan stigma baru dalam masyarakat bahwa laki-laki merupakan jenis kelamin yang lebih

¹⁹ Pius A. Partahto dan M. Dahlanm Al Barry. *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, 1994, hal. 197

²⁰ <http://hqweb01.bkbn.go.id/>. Diakses tanggal 5 September 2006.

unggul dari jenis kelamin perempuan. Stigma ini melahirkan masalah baru dalam masyarakat yang disebut dengan masalah gender, mencakup: diskriminasi, marginalisasi, sub-ordinasi, beban ganda dan tindak kekerasan, *keempat* diskriminasi ini merupakan bias gender.

Bias gender yang terjadi dalam masyarakat telah menyeret kaum perempuan kedalam sisi gelap kehidupannya sebagai manusia. Mereka dianggap *second sex*, dan acap kali diabaikan keberadaannya.

Penderitaan yang dirasakan oleh kaum perempuan yang hampir terjadi diseluruh dunia akhirnya melahirkan dorongan untuk bangkit. Kaum perempuan mulai mencari bentuk ideal dari wadah yang akan digunakan sebagai sarana meningkatkan harkat dan martabat mereka sebagai manusia. Usaha ini kemudian mengilhami lahirnya gerakan feminisme. Gerakan feminisme ini memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan atau kesetaraan gender, merupakan suatu keadaan terdapat kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai bentuk kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan keamanan nasional serta menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender ini meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan, baik terhadap laki-laki maupun perempuan²¹.

Dalam memandang perjuangan kaum perempuan untuk mendapatkan kesetaraan dan keadilan gender, Edward Wilson dari Harvard University (1975)

²¹ *Ibid*

mengemukakan dua kelompok besar konsep yaitu : konsep nurture (konstruksi sosial budaya) dan konsep nature (alamiah).

1. Konsep/Aliran Nurture

Perbedaan laki-laki dan perempuan pada hakekatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya yang menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan ini menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konstruksi sosial ini menempatkan laki-laki dan perempuan dalam perbedaan kelas, kelas borjuis untuk laki-laki dan kelas proletar untuk kaum perempuan.

Perjuangan persamaan ini dipelopori oleh kaum feminis internasional yang cenderung mengejar kesamaan kuantitas/jumlah atau kesamaan proposional dalam segala aktifitas masyarakat. Perjuangan ini mendapat hambatan baik nilai agama maupun budaya, sehingga metode perjuangannya menggunakan **pendekatan sosial konflik**. Konsep sosial konflik menempatkan kaum laki-laki sebagai kaum penindas (borjuis) dan perempuan sebagai kaum tertindas (proletar).

2. Konsep/Aliran Nature

Aliran ini menerima perbedaan kodrat biologis secara ilmiah antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi bahwa diantara dua jenis tersebut diberikan peran dan tugas berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan tetapi ada yang tidak bisa karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya seperti proses kehamilan dan menyusui. Dalam proses perkembangannya banyak kaum perempuan sadar terhadap beberapa kelemahan teori nurture lalu beralih ke aliran nature. Perkembangan nurture dirasa tidak

menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam hidup berkeluarga dan bermasyarakat. Untuk mengejar ketertinggalannya maka dikembangkan konsep pemberdayaan perempuan (*women empowerment*), suatu program khusus (*affirmative action*) untuk memperbaiki posisi dan kondisi kaum perempuan.

Keluarga sebagai suatu unit sosial memberikan perbedaan peran suami dan istri untuk saling melengkapi dan saling bahu membahu satu sama lain. Karena itu peranan keluarga semakin penting dalam masyarakat modern terutama dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Keharmonisan hidup hanya dapat diciptakan bila terjadi pembagian peran dan tugas yang serasi antara laki-laki dan perempuan. Aliran ini melahirkan paham struktur fungsional yang menerima perbedaan peranan asal dilakukan secara demokratis dan dilandasi oleh kesepakatan antara kaum perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Aliran Keseimbangan (Equalibrium)

Disamping kedua aliran tersebut, terdapat paham kompromisistis dikenal dengan keseimbangan yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum laki-laki dan perempuan, karena keduanya harus bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Karena itu penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah kontekstual dan situasional, bukan berdasarkan perhitungan matematis (*quato*) dan tidak bersifat universal.

Hidup akan memiliki makna bila dilakukan dalam hubungan saling mengisi yang dapat diwujudkan melalui strategi *gender mainstreaming*, yaitu strategi untuk menyeimbangkan peranan, kedudukan, dan status antara laki-laki dan perempuan, mulai dari perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan sampai pada pemanfaatan hasil pembangunan²².

Kondisi pemerintahan Hosni Mubarak di masa-masa awal kekuasaannya sangat memprihatinkan, hal ini terlihat dari krisis legitimasi yang terjadi. Indikator-indikatornya adalah sebagai berikut: krisis ekonomi sebagai akibat dari kebijakan *iftihah* Presiden Mohammed Anwar el-Sadat (Anwar Sadat); Muncul oposisi sekuler diwakili oleh *Partai Buruh Sosialis*, yang dipimpin oleh seorang nasionalis veteran, Mr. Ibrahim Shukru, dan *Nation Progressve Unionist Party*, yang dipimpin oleh Mr. Khalid Mohy el Din²³; Terdapat gerakan anti-modernisasi Mesir seperti Ikhwanul Muslimin dan Jamaah Islamiyah; Kemerostan mutu kehidupan masyarakat sebagai benturan dari krisis ekonomi dan krisis politik, dimana masyarakat Mesir Merasa dipermainkan oleh pemerintah; Rasa kecewa yang tinggi mendorong mereka melakukan tindakan-tindakan represif; Serta munculnya tuntutan dari kaum perempuan Mesir terhadap hak-hak mereka yang direnggut oleh pemerintahan sebelumnya dimasa-masa sulit antara tahun 1979 hingga tahun 1980, juga menuntut agar mereka kaum perempuan diberikan keleluasaan untuk aktif dalam mengurus urusan negara.

Gerakan pembebasan kaum perempuan Mesir (feminisme Mesir) semakin menunjukkan eksistensi keberadaan mereka dari dekade ke dekade. Terlihat dari

²² *Ibid*

²³ Mona Makram-Ebeid, *Gerakan-gerakan Opsisi di Mesir*, Prisma 3, maret 1982

gebrakan dengan upaya Perempuan untuk memasuki ranah-ranah vital pemerintah, salah satunya bidang politik. Usaha-usaha tersebut sangat dirasakan terutama pada dekade 1980-an, dimana gerakan yang semula berbentuk *public independent* mulai merubah arah kebijakannya dengan menyatukan kekuatan yang ada sehingga terbentuk wadah perempuan yang besar yang dikemudian hari muncul sebagai generator politik baru di Mesir. Selain itu gerakan ini mendapat dukungan dari banyak pihak, baik dari kalangan dalam negeri maupun luar negeri. Salah satunya pengakuan yang datang dari PBB.

Pergerakan perempuan Mesir mengaplikasikan **Aliran Keseimbangan (Equalibrium)** sebagai landasan perjuangan mereka. Aliran yang mengutamakan kesejajaran dan peran yang harmonis antara perempuan dan laki-laki ini, dalam kurun waktu yang lama telah menuntun kaum perempuan Mesir pada pemikiran bahwa antara kaum perempuan dan kaum laki-laki Mesir harus terdapat sinergi yang positif dengan memperhatikan konstektual dan situasional sehingga kesetaraan gender dapat terwujud.

Sementara itu masalah yang dihadapi oleh Mubarak semakin kompleks ketika dibenturkan oleh fakta bahwa legitimasi suatu pemerintahan di kawasan Timur Tengah tidak saja harus dipenuhi untuk kawasan dalam negeri, namun lebih jauh juga harus dipenuhi diluar batas negaranya. Disini tentunya yang dimaksud Dunia Arab.

Berdasarkan tipe-tipe dari legitimasi diatas dapat penulis beranggapan bahwa tindakan yang diambil oleh Hosni Mubarak untuk menaikkan pamor pemerintahannya menggunakan tipe **legitimasi instrumental**. Dimana Mubarak

berusaha untuk menarik perhatian masyarakat Mesir dan Dunia Arab dengan membuat janji-janji akan kehidupan politik yang lebih baik, melakukan tindakan yang populer (tindakan-tindakan yang ramah), serta bersikap lebih *calm* jika dibandingkan dengan pendahulu-pendahulunya sehingga dikenal sebagai seorang diktator yang moderat.

Ada beberapa langkah urgensi yang dilakukan oleh Hosni Mubarak untuk menaikkan pamornya dimata masyarakat Mesir khususnya dan masyarakat Arab umumnya. Diantaranya adalah kebijakan yang diambilnya terhadap pergerakan perempuan yang berkembang pesat di Mesir pada saat itu, dengan membebaskan tokoh-tokoh perempuan yang dipenjarakan oleh rezim Anwar Sadat. Dan mengingat semakin besarnya dukungan yang diberikan oleh dunia internasional terhadap perkembangan pergerakan perempuan Mesir. Maka Hosni melihat celah untuk meningkatkan legitimasi dengan memberikan perhatian lebih terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh perempuan Mesir. Mubarak menyadari bahwa legitimasi atas kesetaraan gender sebagai nilai fundamental dapat direfleksikan melalui pilihan pembangunan dan praktek kelembagaan.

F. Hipotesa

Hipotesa merupakan pernyataan singkat yang disimpulkan dari kerangka pemikiran dan merupakan jawaban sementara terhadap persoalan yang akan diteliti, sehingga harus dibuktikan kebenarannya.

Pada saat Hosni Mubarak naik menjadi presiden Mesir pada tahun 1981 menggantikan Anwar Sadat, keadaan Mesir dalam situasi terpuruk dengan krisis

kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah dari berbagai kalangan, salah satunya berasal dari kalangan kaum perempuan. Untuk membentuk opini positif serta meningkatkan legitimasinya di mata masyarakat Mesir terutama terhadap kaum perempuan Hosni Mubarak berusaha untuk membuat beberapa kebijakan-kebijakan berikut:

1. Menggunakan isu perempuan sebagai alat legitimasi.
2. Memberikan kursi bagi perempuan untuk aktif di parlemen.
3. Memberikan restu berdirinya organisasi yang bertemakan perempuan.

G. Jangkauan Penelitian

Untuk lebih memfokuskan penelitian agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu meluas, maka penelitian ini dibatasi mulai dari jatuhnya rezim Anwar Sadat dan naiknya Hosni Mubarak di tahun 1981 hingga tahun 1990.

H. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan studi pustaka (*library research*) yaitu teknik pengumpulan data dengan mencari data-data dari kepustakaan buku, informasi-informasi berdasarkan literatur atau referensi baik yang bersumber dari artikel-artikel, majalah-majalah, surat kabar, jurnal, internet, dan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti penulis.

I. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bab yang menguraikan mengenai pokok-pokok penting dalam penulisan sebuah skripsi, yang meliputi: alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, jenis penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II DIALEKTIKA PEREMPUAN DI MESIR

Bab ini berisi mengenai bagaimana perjalanan serta bentuk-bentuk usaha yang ditempuh oleh kaum perempuan Mesir dalam menegakkan haknya.

BAB III RENDAHNYA LEGITIMASI HOSNI MUBAROK

Bab ini menguraikan bagaimana rendahnya legitimasi Hosni Mubarak ketika naik menjadi presiden di tahun 1981.

BAB IV KEBIJAKAN HOSNI MUBAROK DALAM MEMANFAATKAN ISU PEREMPUAN SEBAGAI ALAT UNTUK MENINGKATKAN LEGITIMASINYA.

Bab ini berisi usaha-usaha yang ditempuh oleh Mubarak untuk meningkatkan legitimasi dengan memanfaatkan isu-isu perempuan.

BAB V KESIMPULAN

Berisi kesimpulan dari keseluruhan bab dan penutup.